

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NO. 41 TAHUN 2004
TERHADAP PELAKSANAAN WAKAF TANAH TANPA
AKTA IKRAR WAKAF
(STUDI KASUS DI DESA BELAHAN WARU SIDOARJO)**

SKRIPSI

Oleh:

**MUHAMMAD HAJAR
C02213050**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM (FSH)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad hajar
NIM : C02213050
Fakultas/Jurusan/
prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum
Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004 Terhadap
Pelaksanaan Wakaf Tanah Tanpa Akta Ikrar Wakaf (Studi
Kasus Di Desa Belahan Waru Sidoarjo)

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 Januari 2018

Saya yang menyatakan,



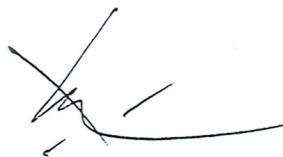
Muhammad hajar

NIM. C02213050

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Hajar NIM. C02213050 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 15 Januari 2018
Dosen Pembimbing



Drs. Ach. Yasin, M. Ag
NIP. 196707271996031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Hajar NIM. C02213050 ini telah di pertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

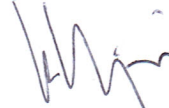
Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



Drs. Ach. Yasin, M.Ag
NIP. 196707271996031002

Penguji II,



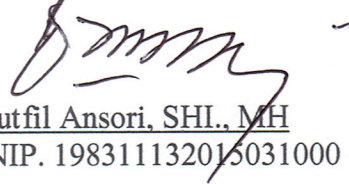
Dra. Hj. Nurhayati, M.Ag
NIP. 196806271992032001

Penguji III,



Dr. H. Muhammad Arif, L.C., M.A
NIP. 197001182002121001

Penguji IV,



Lutfil Ansori, SHI., MH
NIP. 198311132015031000

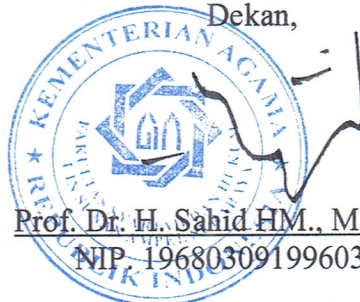
Surabaya,

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. Sahid HM., M.Ag., M.H
NIP. 196803091996031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Hajar
NIM : C02213050
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : muhammadhajar22@yahoo.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NO.41 TAHUN 2004 TERHADAP
PELAKSANAAN WAKAF TANAH TANPA AKTA IKRAR WAKAF (STUDI KASUS DI
DESA BELAHAN WARU SIDOARJO)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Februari 2018

Penulis

(MUHAMMAD HAJAR)
nama terang dan tanda tangan

pembangunan masjid, madrasah, perpustakaan, kuburan dan lain-lain yang mana wakaf tersebut dimanfaatkan oleh orang lain secara umum.

Pelaksanaan wakaf dapat terjadi dengan dua cara yaitu dengan perbuatan dan dengan ucapan. Yang dimaksud dengan pelaksanaan wakaf dengan cara perbuatan adalah suatu perbuatan seseorang yang menunjukkan tanda-tanda bahwa hartanya akan diwakafkan, seperti apabila seseorang membangun masjid kemudian memberikan izin kepada orang lain untuk shalat di dalamnya. Maka hal tersebut dapat dikatakan bahwa orang tersebut telah mewakafkan harta bendanya dalam bentuk perbuatan.

Yang kedua melalui perkataan atau lisan, dimana pewakif secara nyata dan jelas menyebutkan bahwa dirinya akan mewakafkan suatu barang. Baik perkataan itu secara jelas (*sharih*), seperti “saya mewakafkan”, “saya hentikan pemanfaatannya”, atau “saya abadikan”. Dan ucapan secara samar (*kinayah*), seperti “saya sedekahkan” akan tetapi orang tersebut mempunyai niat untuk mewakafkannya.

Dalam hal terjadinya wakaf seperti cara yang pertama, yaitu dengan cara perbuatan saja tanpa adanya ucapan, terjadi perbedaan di antara para ulama. Salah satu ulama yang mendukung pendapat tersebut adalah Imam Hanbali yang menyatakan bahwa “wakaf dapat terjadi secara sah dengan perbuatan yang disertai dengan *qarinah* (tanda) yang menunjukkan wakaf”. Bahkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal tidak halal menarik kembali bangunan yang telah dijadikan sebagai masjid atau

yang berhubungan dengan perbuatan manusia dewasa yang sehat akalnya. Suatu rangkuman yang meliputi seluruh kewajiban keagamaan, segala perintah Tuhan yang mengatur tata kehidupan setiap muslim dalam semua aspeknya.

- b. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf adalah Peraturan yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang perwakafan yang ada di Indonesia yang terkait dengan ketentuan-ketentuan yang akan dijadikan alat analisis secara spesifik mengenai pelaksanaan wakaf tanpa akta ikrar wakaf.
- c. Wakaf yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dengan memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan mengembangkannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.
- d. Pelaksanaan Wakaf, Pelaksanaan wakaf yaitu penyerahaan tanah dari Wākif ke Nadzir untuk selanjutnya di catatkan pada PWI untuk dibuatkan akta Wakaf.
- e. Akta Ikrar Wakaf yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bukti pernyataan kehendak orang yang berwakaf (wākif) untuk mewakafkan harta miliknya untuk dikelola oleh nadzir sesuai dengan peruntukannya yang dituangkan dalam akta. Sedangkan akta sendiri memiliki arti surat resmi yang diberi tanda tangan oleh pejabat

Bab *Pertama*, Pendahuluan. Pada bab ini akan dikemukakan hal yang sifatnya sebagai pengantar untuk memahami isi skripsi. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, Landasan Teori. Pada bab ini akan diuraikan kajian pustaka yang berkaitan dengan penelitian yaitu membahas mengenai teori wakaf secara umum meliputi pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, syarat rukun wakaf, macam-macam wakaf, teori ikrar wakaf, syarat sah ikrar wakaf dan ikrar wakaf dalam undang-undang No. 41 Tahun 2004.

Bab *Ketiga*, Perihal data penelitian. Pada bab ini membahas tentang sekilas gambaran umum tentang lokasi penelitian, populasi atau subyek penelitian, proses wakaf, serta pelaksanaan wakaf.

Bab *Keempat*, Hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini akan dibahas dan digambarkan tentang analisis hukum Islam dan analisis Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Terhadap Pelaksanaan wakaf tanah tanpa akta ikrar wakaf.

Bab *Kelima*, Penutup. Pada bab ini berisi hal-hal yang mencakup kesimpulan hasil akhir penelitian dan saran-saran dari peneliti terhadap pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

dilakukannya. Bahkan hemat saya, mempublikasikan tindakan sedekah termasuk di dalamnya *wakaf* adalah baik-baik saja, meskipun menyembunyikannya itu lebih baik.

Pada masa 'Umar ibn al-Khathab ra mewakafkan tanahnya, beliau sendiri yang menjadi nadzirnya. Sepeninggalnya, pengelolaan *wakaf* diserahkan kepada putrinya Hafshah, dan setelah itu ditangani Abdullah ibn 'Umar, kemudian keluarganya yang lain. Boleh jadi "sunnah" awal demikian, berikutnya tentang *nadzir* ini tidak ditempatkan sebagai salah satu rukun *wakaf*. Karena posisi *nadzir* sangat penting dan strategis sebagai bagian tak terpisahkan bagi keberhasilan *wakaf* dan realisasi pengelolaan harta *wakaf*.

Oleh karena itu, untuk menjadi *nadzir*, seseorang harus memiliki persyaratan dan kualifikasi tertentu, agar dia bisa mengemban amanat itu dengan sebaik-baiknya. Posisi atau eksistensi *nadzir* sangat penting untuk tertib administrasi, tanpa *nadzir* bisa saja sewaktu-waktu kelak timbul masalah. Integritas kepribadian *nadzir* ini menjadi sangat penting, termasuk ketika *nadzir* yang pertama sudah "purna tugas" maka penggantinya sedapat mungkin memiliki kepribadian yang amanah. Atau supaya amanahnya tetap terjaga, *nadzir*, sebaiknya dilaksanakan *nadzir* secara kolektif.

Wedoro merupakan sisa buangan dari limbah Industri dan limbah Rumah tangga Wilayah Kecamatan Waru.

Tingkat kepadatan penduduk di Desa Wedoro termasuk sedang dengan nilai 411 jiwa per km. Sedangkan mata pencaharian pokok terbesar adalah sebagai buruh Industri dan Rumah Tangga. Akan tetapi dengan banyaknya usia yang masih produktif sekitar 74% diharapkan di masa depan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang tinggi di seluruh bidang. Desa Wedoro dibagi menjadi 9 Rukun Warga. Semua kegiatan Pemerintahan yang ada semuanya dalam keadaan aktif. Sebagian besar tingkat pendidikan aparat Desa adalah Sekolah Menengah Atas. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebanyak 9 orang dalam keadaan aktif, sedangkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) mempunyai pengurus sebanyak 6 orang.

Desa mempunyai Koperasi Simpan Pinjam sebanyak 1 unit dengan 1 kegiatan dan mempunyai 32 orang pengurus serta anggota, Lembaga pendidikan yang ada di Desa Wedoro Terdiri dari Play Group (PG), Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Perguruan Tinggi.

Penduduk Desa Wedoro hingga tahun 2016 sejumlah 16.620 jiwa dan 5607 KK, Komposisi penduduk Desa berdasarkan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin diketahui bahwa sejumlah 51%

E. Problematika Tanah Wakaf Khairi

Dalam pengumpulan data yang telah didapatkan ada beberapa data yang dapat menguatkan untuk dijadikan bahan dalam penelitian ini. Pada pengumpulan data yang dikumpulkan dan diperoleh memiliki keakuratan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada subyek penelitian yang telah diteliti, yaitu tanah wakaf yang dijadikan permasalahan di Desa Wedoro tersebut banyak ditemukan tanah wakaf yang tanpa surat resmi dari pemerintahan setempat, sehingga tanah wakaf tersebut menjadi permasalahan yang ada di Desa Wedoro.

Proses tanah wakaf yang ada di Desa Wedoro sistem yang digunakan beda dengan sistem yang dahulu, kalau sistem dahulu menggunakan akad (serah terima) dengan cara lisan tanpa ada surat resmi dari pemerintah setempat atau memiliki badan hukum yang menguatkan tanah wakaf tersebut dan sistem yang digunakan sekarang, yaitu sistem yang harus mendapatkan surat resmi dari pemerinthan setempat atau memiliki badan hukum yang menguatkan tanah wakaf tersebut. Oleh karena itu sebagian besar tanah yang dahulunya ditujukan untuk tanah wakaf akan tetapi sekarang menjadi tanah wakaf yang dialih tangankan menjadi tanah milik pribadi dan dikuatkan dengan surat resmi dari pemeritahan setempat. Karena pemilik tanah wakaf yang diturunkan/diwariskan oleh pemilik pertama tidak menginginkan tanah tersebut dijadikan tanah wakaf.

dibangun tempat beribadah, akan tetapi pada sepeninggal meninggalnya bapak pake ahli waris meminta kembali tanah wakaf tersebut, yang menganggap bahwa tanah tersebut masih menjadi haknya.

Ahli waris (Bapak Pake) yang bernama Muisa mendatangi tanah wakaf itu untuk menarik tanah wakafnya untuk dimiliki kembali dan menjualnya, ahli waris menyatakan kepada Bapak basor ingin menarik kembali tanah yang telah terbangun Masjid. Disamping melakukan penarikan secara terbuka, wāḳif juga menyampaikan jangan menarik tanah wakafnya, tetapi ahli warisnya memaksa dengan penarikan itu dengan secara tertulis yang di tujukan kepada Bapak Bashor (Nadzir).

Penarikan kembali tanah wakaf ini hanya di lakukan oleh salah satu wāḳif yaitu Muisa (ahli waris Bapak Pake) yang keluarga lainnya itu tidak mempunyai keinginan menarik kembali, tetapi ahli waris ingin menjualnya lalu tanah wakaf tersebut di tarik kembali, akibat dari ahli waris tersebut maka adanya penarikan dari ahli waris (Bapak Muisa). Sejak adanya penarikan penarikan pada tahun (2005) sampai sekarang pada tahun (2017) tidak ada tindakan hukum dari nadzir untuk menyelesaikan kasus ini kepengadilan. selama ini nadzir hanya melakukan pendekatan secara kekeluargaan (musyawarah) yang di lakukan dengan bersilaturrehmi kerumah si wāḳif (Bapak Muisa), akan tetapi semua cara di tempuh nadzir ini belum mendapatkan, menggembirakan. Lalu wāḳif (Bapak Muisa) masih tetap pada pendiriannya yaitu menarik kembali tanah wakaf.

3. Surat keterangan pendaftaran tanah,
4. Izin dari bupati/walikota/kepala daerah c.q. Kepala Subdirektorat Agraria setempat”.

Jika merujuk pada peraturan diatas bahwa sudah seharusnya pihak wākif setelah mengucapkan ikrar wakaf secara lisan juga harus menyerahkan surat-surat tanah tersebut, sehingga perlu ditelusuri lagi terkait anak turun dari wākif yang mengaku memiliki surat tanah dari tanah wakaf tersebut.

Memang kelemahan dari kasus ini dari segi Hukum Yuridis adalah bahwa pihak Nadzir tidak mempunyai bukti apapun atau bukti akta ikrar wakaf, karena penyerahan tanah wakaf tersebut hanya secara lisan dan dihadapan saksi, dan saat ini pra saksi sudah meninggal sehingga tidak ada saksi yang melihat secara langsung terhadap ikrar wakaf lisan antara wākif dan nadzir.

Akan tetapi sengketa wakaf ini dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 membuka peluang untuk menyelesaikan sengketa tersebut, pada pasal 62 :

- a. Penyelesaian masalah sengketa wakaf ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- b. Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui, arbitrase dan pengadilan.

Sehingga salah satu penyelesaian adalah dengan bermusyawarah secara kekeluargaan dengan ahli waris dari wākif terhadap menyelesaikan sengketa sehingga diharapkan menemukan jalan keluar dari sengketa tersebut. Jika merujuk

dari masalah diatas musyawarah ini untuk mengklarifikasi kepada pihak ahli waris tentang kepemilikan surat tanah yang dimiliki, dan mencari jalan keluar terhadap masalah sengketa tersebut.

Jika usaha Musyawarah tidak berhasil maka pihak yang memperkarakan kasus ini bisa mengajukan tuntutan kepada pengadilan, pengadilan yang diberi kewenangan absolute untuk menangani permasalahan sengketa wakaf adalah Pengadilan Agama. Dasar dari Pengadilan Agama adalah Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang menyebutkan “Pengadilan Agama bertugas dan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, di bidang :

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah, dan
- i. Ekonomi syari’ah

- Muchlis. *“Peralihan Penguasaan Yuridis Hak Atas Tanah Wakaf dalam Perspektif Hukum Tanah Nasional dan Hukum Islam”*. Skripsi—IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009.
- Moh Rifa’I, Dkk. *Terjemah Khulasah Kifayah Al-Akhyar*. Semarang: Toha Putra, 1978.
- Narbuko, Chalid dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Sabiq, Sayyid *Fiqh Sunnah*. juz XIV. Beirut : Dar al-Fikr, t.t.
- Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam*. 1997. Surabaya : Arkola, pasal 218.
- Sari, Elsi Kartika. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo, 2006.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, cet. III, 1986.
- Soeratno, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UUP AMP YKPM. 1995.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Tim Redaksi Fokus Media. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan*. Bandung: Fokus Media, 2005.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung Cet. Ke-8, 1990.